

*Positioning Madrasah Dalam Penguatan Pendidikan Karakter
(Perspektif Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 Tentang
Penguatan Pendidikan Karakter)*

Fery Diantoro

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
ferydian11@gmail.com

ABSTRACT: *Character education is one solution to the problems of morality, character and other deviant behavior that is happening in this country. Strengthening character education becomes something important that must be supported by all components ranging from educational institutions, families and communities. In order to support the reinforcement, the president also issued a regulation on strengthening character education. Madrasah that become one of the formal educational institutions are also required to carry out the strengthening of character education as mandated. The positioning of madrasah should also be appropriate in the organization of strengthening character education, as it will impact on community appraisal. Positioning madrasah in organizing character education reinforcement is carried out through intra-curricular, ko-curricular and extracurricular programs and positioning madrasah in addressing school admission days, madrasah can take the five day entry option with a system integrating the madrasah system with the pesantren system or taking six day entry options by strengthening the three curricular programs , with programs that show off that can be directly seen and felt the benefits by the community.*

Keywords: *Character, Madrasah and Positioning.*

ABSTRAK: Pendidikan karakter menjadi salah satu solusi atas permasalahan moral, akhlak dan perilaku menyimpang lainnya yang sedang terjadi di Negara ini. Penguatan pendidikan karakter menjadi sesuatu yang penting yang mesti didukung oleh seluruh komponen

mulai dari lembaga pendidikan, keluarga dan masyarakat. Dalam rangka mendukung penguatan tersebut presiden juga mengeluarkan Peraturan tentang penguatan pendidikan karakter. Madrasah yang menjadi salah satu lembaga pendidikan formal dituntut juga mampu melaksanakan penguatan pendidikan karakter sebagaimana yang telah diamanatkan. *Positioning* madrasah juga harus tepat dalam penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter, karena akan berdampak pada penilaian masyarakat. *Positioning* madrasah dalam menyelenggarakan penguatan pendidikan karakter dilakukan melalui program intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler dan *positioning* madrasah dalam menyikapi hari masuk sekolah, madrasah dapat mengambil opsi hari masuk lima dengan sitem mengintegrasikan sistem madrasah dengan sistem pesantren atau mengambil opsi masuk enam dengan penguatan di ketiga program kurikuler, dengan program-program yang *show off* yang bisa langsung dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kata Kunci: Karakter, Madrasah dan Positioning.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan seseorang karena melalui pendidikan seseorang dapat meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mengembangkan potensi diri dan dapat membentuk pribadi yang bertanggung jawab, cerdas dan kreatif. Dewasa ini upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak. Upaya-upaya tersebut dilandasi suatu kesadaran betapa pentingnya peranan pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan watak bangsa (*nation character building*) untuk kemajuan masyarakat dan bangsa. Harkat dan martabat suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Dalam konteks bangsa Indonesia, peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan dibidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh.

Pendidikan merupakan upaya terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik, sehingga mereka memiliki sistem berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yang diwariskan masyarakatnya dan

mengembangkan warisan tersebut kearah yang sesuai untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang. Sebagaimana menurut pendapat Afiful Ikhwan perencanaan merupakan aspek penting dari pada manajemen. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa depan yang menentu tetapi menciptakan masa depan itu. Dengan demikian landasan dasar perencanaan adalah kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternative masa depan yang dikehendaknya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya,¹ dalam hal ini tentang rencana penguatan pendidikan karakter.

Pendidikan sebagai usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik juga suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi muda bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik dimasa depan ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda dan proses pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa dimasa mendatang.

Hal diatas seakan kontras jika dihadapkan dengan kondisi perkembangan masyarakat Indonesia saat ini. Masih banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh generasi muda, anak usia sekolah seperti kenakalan remaja, tawuran dan bahkan terjerumus ke lubang narkoba. Selain penyimpangan pada remaja, praktek-praktek korupsi juga mewabah pada *elite* bangsa ini. Dengan kondisi yang sedemikian itu seakan ada yang salah dengan pendidikan, atau seakan ada yang tidak sesuai antara konsep pendidikan nasional dengan yang dibutuhkan masyarakat.

Lebih jauh bahwa adanya krisis moral di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yaitu: krisis kejujuran, krisis tanggung jawab, tidak berpikir jauh ke depan, krisis disiplin, krisis kebersamaan, krisis keadilan, krisis kepedulian. Selain itu juga terjadi meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Kondisi krisis moral ini harus disadari oleh bangsa ini, bahwa jika dibiarkan akan sangat membahayakan perkembangan dan kemajuan bangsa. Krisis moral tersebut berkaitan

¹Afiful Ikhwan. *Manajemen Perencanaan Pendidikan Islam (Kajian Tematik Al-Qur'an dan Hadist)*, EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 4, Nomor 1, Juni 2016. 129-130.

dengan karakter yang dimiliki masyarakat secara keseluruhan. Sehingga penting masyarakat memiliki karakter yang kuat yang sesuai dengan falsafah bangsa.

Pendidikan saat ini masih mengedepankan penguasaan aspek keilmuan dan kecerdasan kognitif peserta didik. Jika peserta didik sudah mencapai nilai atau lulus dengan nilai akademik memadai atau diatas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), pendidikan dianggap sudah berhasil. Pembentukan karakter dan nilai-nilai budaya bangsa didalam diri peserta didik semakin terpinggirkan. Rapuhnya karakter dan budaya dalam kehidupan berbangsa bisa membawa kemunduran peradaban bangsa. Padahal, kehidupan masyarakat yang memiliki karakter dan budaya yang kuat akan semakin memperkuat eksistensi suatu bangsa dan negara.

Oleh karena itu betapa pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan yang telah dikonsep dalam sistem pendidikan nasional sebenarnya telah mengarahkan pada penguatan karakter peserta didik, untuk menghasilkan peserta didik yang sempurna. Penguatan pendidikan karakter (*character education*) dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita.

Pendidikan karakter merupakan tanggung jawab semua pihak. Lembaga pendidikan, keluarga dan masyarakat ikut berkewajiban untuk melakukan tugas ini meskipun lembaga pendidikan memegang peran penting dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Namun apabila pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tidak mendapat dukungan dari keluarga dan masyarakat, segala upaya yang dilakkan oleh lembaga pendidikan dalam menerapkan pendidikan karakter akan menjadi sia-sia. Karena karakter seseorang dibentuk oleh berbagai faktor diantaranya adalah pendidikan, keluarga dan lingkungan masyarakat.

Pendidikan karakter saat ini kembali di gaungkan pemerintah, karena begitu banyak permasalahan-permasalahan di negeri ini yang berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangan moral, nilai-nilai budaya bangsa dan etika, baik penyimpangan tersebut yang dilakukan para generasi muda maupun para *elite* bangsa, sehingga pemerintah merasa pendidikan karakter saat ini sangat diperlukan.

Mulai tahun 2010 pendidikan karakter sudah mulai diprogramkan oleh pemerintah melalui Kemendiknas dengan program-program aksi pendidikan karakter secara nasional. Tapi hal itu sepertinya belum dirasakan secara maksimal sehingga pada pertengahan tahun 2017 pemerintah melalui Peraturan Presiden menerbitkan kebijakan tentang penguatan pendidikan karakter. Yang

mana hal ini diawali adanya problem terkait dengan kebijakan hari sekolah yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter merupakan solusi atas problem yang terjadi terkait kebijakan Mendikbud tentang hari sekolah. Dalam Peraturan tersebut memuat tentang pelaksanaan penguatan pendidikan karakter dan sekaligus memberikan arahan terkait dengan hari sekolah.

Madrasah sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, sudah pasti termasuk bagian yang tak terpisahkan sebagai hal yang terkait dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Dengan semua itu madrasah mesti menyiapkan segalanya dalam rangka melaksanakan penguatan pendidikan karakter. Maka kaitannya dengan pelaksanaan Peraturan tersebut, perlu diuraikan dan dijelaskan bagaimana madrasah menyikapi dan melaksanakannya. Dalam pelaksanaannya *positioning* madrasah juga harus tepat karena akan berdampak pada penilaian masyarakat terhadap madrasah yang berujung pada Keputusan masyarakat untuk memilih madrasah tersebut. Maka fokus dalam kajian ini adalah bagaimana *positioning* madrasah dalam menyelenggarakan penguatan pendidikan karakter dan bagaimana *positioning* madrasah dalam menyikapi hari sekolah sesuai dengan isi dalam Peraturan presiden tersebut. Sedangkan uraian dalam membahas fokus persoalan diatas dengan menggunakan kajian konseptual.

***Positioning* Madrasah**

Istilah *positioning* sebenarnya lebih dikenal dalam bidang pemasaran, bagaimana sebuah perusahaan atau produk mampu menetapkan posisinya dalam segmentasi pasar untuk menghadapi para pesaing-pesaingnya. Penetapan posisi ini menjadi sesuatu yang penting dalam pemasaran selain untuk menghadapi para pesaing juga sebagai salah satu ketepatan posisi untuk memudahkan masyarakat selaku pelanggan dan konsumen untuk mengenali perusahaan atau produk tersebut.

Kotler dan Keller berpendapat bahwa *positioning* atau penetapan posisi merupakan tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan sehingga menempati posisi yang khas dibandingkan para pesaing di dalam benak pelanggan sarannya. *Positioning* adalah terciptanya proporsi nilai yang pas, yang menjadi alasan bagi pelanggan untuk membeli.² Dan dalam pandangan Saxena *positioning* adalah komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan sehingga menempati

²Philip Kotler and Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran Jilid I (Edisi Ke-12)* (Jakarta: PT Index, 2008), 375.

tempat yang berbeda dan memiliki nilai di dalam benak konsumennya.³

Perusahaan harus merancang posisinya agar memiliki daya tawar dengan citra yang dibangunnya serta menyuguhkan sesuatu yang berbeda dengan para pesaingnya, sehingga dapat menempati tempat yang berbeda dan berharga di benak pelanggan. Penempatan posisi produk dimaksudkan sebagai strategi yang meletakkan citra baik produk di dalam benak konsumen sehingga produk tersebut terlihat lebih unggul dari produk pesaing.

Komunikasi bagian penting untuk mendukung positioning, karena memegang peranan bagi pemasar yang dalam hal ini mengacu pada tim promosi. Tanpa komunikasi masyarakat tidak akan mengetahui keberadaan suatu produk di pasaran. Dan tidak akan timbul perhatian dari masyarakat untuk memiliki kesamaan persepsi dengan perusahaan tentang produk yang ditawarkan tersebut.

Madrasah merupakan salah satu bentuk institusi atau lembaga pendidikan Islam, sebagaimana perusahaan, di madrasah juga menawarkan jasa pendidikan bagi pelanggan atau masyarakat pada umumnya. Sehingga penting juga bagi madrasah untuk menetapkan posisinya dalam rangka menghadapi pesaing-pesaingnya (lembaga-lembaga pendidikan lain) serta membangun citra untuk mengambil hati masyarakat sebagai pelanggan agar mau memilih dan menggunakan jasa pendidikan yang ada di madrasah. Kesan yang berbeda dan lebih unggul harus dibangun dan dimiliki madrasah ditengah-tengah pusaran persaingan pendidikan yang berkembang saat ini. Selain itu juga untuk membentuk dan membangun *image* madrasah agar tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat atau tidak hanya dianggap sebatas lembaga pendidikan kedua dalam sistem pendidikan nasional. Jadi penting adanya *positioning* atau penetapan posisi bagi madrasah, sebagai sebuah usaha dalam memasarkan jasa pendidikan yang ada dan sedang dikembangkan.

Dalam positioning ini adalah untuk merancang sebuah strategi yang mendefrensiasikan atau menciptakan diferensiasi yang unik dalam benak masyarakat selaku pelanggan jasa pendidikan yang merupakan sasaran, sehingga tercipta citra dan image terhadap sebuah label madrasah yang lebih unggul dan komplit dibandingkan produk pendidikan yang lain atau kompetitor dalam hal menyediakan dan menawarkan jasa pendidikan.

³Rajan Saxena, *Marketing Management*, 4th ed. (New York: The McGraw- Hill, 2009), 278.

Eksistensi Madrasah

Madrasah merupakan satu dari bentuk lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam adalah penjelmaan atas pengembangan model pendidikan Islam klasik, dengan berkembangnya zaman dan pengetahuan serta pengaruh tuntutan masyarakat menjadikan madrasah untuk mengikuti perkembangan tersebut. Madrasah muncul menjadi sebuah alternative atas kebutuhan masyarakat akan keberagaman. Karena pendidikan agama menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat yang berbarengan dengan kemajuan zaman dan teknologi, selain itu juga untuk membantu membina peningkatan moral dan akhlakul karimah.

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam atau sekolah umum yang bercirikan Islam dan merupakan pengembangan dari pendidikan Islam yang dulunya masih bersifat tradisional. Pengetahuan dan keterampilan seseorang akan cepat usang selaras dengan percepatan kemajuan IPTEK dan perkembangan zaman, sehingga madrasah pada dasarnya sebagai wahana untuk mengembangkan kepekaan intelektual dan informasi serta memperbaharui pengetahuan, keterampilan secara berkelanjutan agar tidak cepat usang. Madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan, hingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, mampu bersaing serta mampu menghadapi tantangan zaman.⁴

Dengan berbagai macam problematika yang mengiringi perkembangan madrasah, pada kenyataannya madrasah mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dalam hal pendidikan dan memiliki peluang besar untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Merangkum pendapat Agus Maimun dan Agus Zainul Fitri atas jawaban dari problem kelembagaan madrasah bahwa ada tiga hal yang bisa dilakukan madrasah untuk mampu menentukan posisinya didalam memenuhi tuntutan masyarakat, yaitu : 1) Madrasah harus merespon dan mengapresiasi tuntutan masyarakat secara cepat dan cerdas untuk menjadi sebuah pilihan yang tepat; 2) Pendidikan madrasah harus mampu mengapresiasi status sosial dan keagamaan; dan 3) Madrasah harus mampu menjawab tantangan arus globalisasi dan modernisasi yang berimplikasi pada tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pendidikan yang disamping dapat mengembangkan potensi-

⁴Afiful Ikhwan, *Akreditasi Madrasah Aliyah (MA) Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional*, Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 2, Nomor 2, November 2014, 564-565.

potensi akademik ilmu pengetahuan dan teknologi juga internalisasi nilai-nilai religious.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin ketatnya daya saing antar lembaga pendidikan, untuk menunjukkan eksistensinya madrasah juga harus terlibat dengan memperbaiki dan mengembangkan sistem serta program-program yang dibutuhkan masyarakat. Menurut Wijaya bahwa, Situasi kompetisi pendidikan yang bergolak dengan semakin banyaknya ketidakpastian termasuk kehadiran sekolah kompetitor baru yang tidak terduga, mengakibatkan keberhasilan kompetisi pendidikan dimasa lalu tidak dapat menjadi ukuran untuk menghadapi kompetisi pendidikan di masa mendatang.⁶ Artinya bahwa keberadaan madrasah yang telah berdiri dan berjaya di masa silam tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk kemajuan madrasah saat ini terutama dalam hal strategi. Setiap masa memiliki dinamika dan perubahan menuntut untuk menyusun strategi baru yang lebih jitu sesuai dengan dinamika dan kondisi saat ini.

Penguatan Pendidikan Karakter

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menegaskan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) juga terpapar secara tersurat berbagai kompetensi yang bersangkutan dengan karakter di samping intelektualitas. Dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional diatas sangat erat kaitannya dengan karakter peserta didik yang ingin dikembangkan. Ini semua menandakan bahwa sesungguhnya pendidikan bertugas mengembangkan karakter sekaligus intelektualitas berupa kompetensi peserta didik.

Karakter yang dalam bahasa Inggris *character* berarti *moral strength* atau kekuatan moral, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia karakter berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain; tabiat; watak. Artinya bahwa

⁵Agus Maimun and Agus Zaenul Fitri, *Madrasah Unggulan (Lembaga Pendidikan Alternatif Di Era Kompetitif)* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 11-12.

⁶David Wijaya, *Pemasaran Jasa Pendidikan* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 64.

karakter merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh manusia. Karakter erat kaitannya dengan kepribadian (*personality*), seseorang dikatakan berkarakter apabila ia berperilaku sesuai dengan atauran dan etika moral yang berlaku di wilayah tersebut.

Jika dilacak kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “*to mark*” atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, menghargai waktu, pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan (*estetis*), sportif, tabah, terbuka, tertib.

Karakter berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap merupakan predisposisi terhadap suatu objek atau gejala, yaitu positif atau negatif. Nilai berkaitan dengan baik dan buruk yang berkaitan dengan keyakinan individu. Jadi, karakter seseorang dibentuk melalui pengalaman sehari-hari, apa yang dilihat dan apa yang didengar terutama dari seseorang yang menjadi acuan atau idola seseorang⁷. Namun dalam pandangan Na'im, Karakter, secara lebih jelas, mengacu kepada serangkaian sikap (*attitudes*), perilaku (*behaviors*), motivasi (*motivations*) dan ketrampilan (*skills*)⁸.

Karakter yang baik merupakan modal dasar bagi individu yang diperlukan untuk membangun peradaban dan karakter bangsa secara menyeluruh guna berkembang menjadi bangsa yang unggul dan dihormati oleh bangsa lain. Soebahar mengutip dari kamus Wikipedia, menjelaskan bahwa karakter yang baik mencakup sejumlah atribut yang terkait dengan perilaku atau kebiasaan baik, termasuk

⁷Djemari Mardapi, “Penilaian Pendidikan Karakter,” *Bahan Tulisan Penilaian Pendidikan Karakter UNY*, 2011, http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/Penilaian_karakter.pdf.

⁸Ngainum Naim, *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan Dalam Pengembangan Ilmu Dan Pembentukan Karakter Bangsa* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 55.

keluhuran (*virtues*), integritas (*integrity*), keberanian (*courage*), konsistensi (*fortitude*), kejujuran (*honesty*), dan kesetiaan (*loyalty*)⁹. Karakter juga berasal dari nilai sosial-budaya masyarakat bersumber pada hasil karya akal budi manusia, sehingga dalam menerima, menyebarluaskan, melestarikan dan melepaskannya, manusia menggunakan akalnya.¹⁰

Karakter baik berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, dan nilai-nilai lainnya. Individu juga memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul, dan individu juga mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya tersebut.

Ada kondisi sosial yang membentuk terciptanya karakter dalam diri manusia. Disinilah diperlukan suatu upaya untuk membangun karakter yang bisa membentuk watak dan mental manusia yang bisa mengatasi keadaannya yang didesain oleh kekuatan dari luarnya¹¹. Keterkaitannya dengan hal itu bahwa karakter merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.

Karena memungkinkan adanya pengaruh dari luar maka karakter seseorang dapat dibangun dan dikembangkan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang diharapkan. Pendidikan adalah proses pembangunan karakter. Dan menurut Mu'in pembangunan karakter adalah proses membentuk karakter, dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik¹².

Dalam membangun karakter anak bangsa Kemendiknas (sekarang Kemendikbud) sejak tahun 2010 telah melakukan gerakan nasional pendidikan karakter dengan melahirkan sekolah-sekolah rintisan yang mampu melaksanakan pembentukan karakter secara kontekstual sesuai dengan potensi lingkungan setempat. Karakter adalah nilai-nilai yang unik/baik yang terpatneri dalam diri dan

⁹Abd Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 212.

¹⁰Afiful Ikhwan, *Perguruan Tinggi Islam dan Integrasi Keilmuan Islam: Sebuah Realitas Menghadapi Tantangan Masa Depan*, Jurnal Ilmu Tarbiyah "At-Tajdid", Vol.5, No.2, Juli 2016, 160.

¹¹Fatchul Mu'in, *Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoretik & Praktik*, Cet. 1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 293.

¹²*Ibid.*, 293.

terjawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olahraga seseorang atau sekelompok orang.

Karakter sangatlah beragam bentuknya, terdapat 18 nilai karakter bangsa yang dicanangkan oleh pemerintah, diantaranya: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab.

Pendidikan karakter bukan hanya sekedar memberikan Pengertian atau definisi-definisi tentang baik dan buruk, melainkan sebagai upaya merubah sifat, watak, kepribadian, dan keadaan batin manusia sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap luhur dan terpuji. Melalui pendidikan karakter ini diharapkan dapat dilahirkan manusia yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya, tanpa paksaan disertai rasa penuh tanggung jawab. Yaitu manusia-manusia yang merdeka, dinamis, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri, manusia, masyarakat, bangsa dan Negara¹³.

Pada panduan pelaksanaan pendidikan karakter (2011) Kemendiknas memberikan panduan bahwa pendidikan karakter bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan pengetahuan yang baik (*moral knowing*), perasaan yang baik atau *loving good* (*moral feeling*) dan perilaku yang baik (*moral action*) sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik.

Masih dalam panduan tersebut pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi : (1) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2) membangun bangsa yang berkarakter Pancasila; (3) mengembangkan potensi warganegara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia. Sedangkan fungsi pendidikan karakter adalah : (1) membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural; (2) membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan

¹³Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam; Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 165.

mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia; mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; (3) membangun sikap warganegara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni.

Pada konteks Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), merujuk pada Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Sebagai penjawantahan Gerakan Nasional Revolusi Mental sekaligus bagian integral Nawacita, Gerakan PPK menempatkan pendidikan karakter sebagai dimensi terdalam atau inti pendidikan nasional sehingga pendidikan karakter menjadi poros pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut, Gerakan PPK perlu mengintegrasikan, memperdalam, memperluas, dan sekaligus menyelaraskan berbagai program dan kegiatan pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan sampai sekarang. Dalam hubungan ini pengintegrasian dapat berupa pemaduan kegiatan kelas, luar kelas di sekolah, dan luar sekolah (masyarakat/komunitas); pemaduan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; pelibatan secara serempak warga sekolah, keluarga, dan masyarakat; perdalaman dan perluasan dapat berupa penambahan dan pengintensifan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengembangan karakter siswa, penambahan dan pemajanan kegiatan belajar siswa, dan pengaturan ulang waktu belajar siswa di sekolah atau luar sekolah; kemudian penyelerasan dapat berupa penyesuaian tugas pokok guru, Manajemen Berbasis Sekolah, dan fungsi Komite Sekolah dengan kebutuhan Gerakan PPK. Baik pada masa sekarang maupun masa akan datang, pengintegrasian, pendalaman, perluasan, dan penyelarasan program dan kegiatan pendidikan karakter tersebut perlu diabdikan untuk mewujudkan revolusi mental atau revolusi karakter bangsa. Dengan demikian, Gerakan PPK merupakan jalan perwujudan Nawacita dan Gerakan Revolusi Mental di samping menjadi inti kegiatan pendidikan yang berujung pada terciptanya revolusi karakter bangsa.

Gerakan PPK menempatkan nilai karakter sebagai dimensi terdalam pendidikan yang membudayakan dan memberadabkan para pelaku pendidikan. Ada lima nilai utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK. Kelima nilai utama karakter bangsa yang dimaksud adalah sebagai berikut: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas.

Positioning Madrasah Dalam Penguatan Pendidikan Karakter

Dalam hal ini, positioning madrasah dalam penguatan pendidikan karakter mengacu dalam isi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 6 september tahun 2017. Perpres yang memiliki 6 bab dan 18 pasal pada tanggal yang sama mulai diundangkan melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Kemunculan Perpres tersebut sebagai solusi atas ketegangan pro dan kontra peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang hari sekolah yang point ketegangan terkait dengan full day school. Beberapa *stakeholder* dan ormas Islam ada yang mempermasalahkan tentang penerapan full day school tersebut karena berpandangan akan mengurangi waktu jam pelajaran madrasah diniyah. Tetapi juga tidak sedikit yang setuju dengan Peraturan tersebut. Dan untuk meredam ketegangan tersebut kemudian Presiden membuat Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang secara otomatis menggantikan Peraturan menteri tersebut.

Isi atau konten dalam Perpres tersebut terbagi dalam 6 bab, yaitu;

Bab I, Ketentuan Umum, dari pasal 1 sampai pasal 5

Bab II, Penyelenggaraan Penguatan pendidikan Karakter, dari pasal 6 sampai pasal 11

Bab III, Pelaksana dan Tanggung Jawab, dari pasal 12 hingga pasal 14

Bab IV, Pendanaan, terdapat pada pasal 15 dan 16

Bab V, Ketentuan Penutup pada pasal 17 dan 18

Konsep PPK pada pasal 1 point 1 dijelaskan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Pada pasal 3 diterangkan bahwa PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.

Cakupan atau ruang lingkup Perpres tersebut ada 3 (tiga) hal, sebagaimana yang termuat pada pasal 4 peraturan tersebut. Berikut ruang lingkup Perpres tentang Penguatan Pendidikan Karakter meliputi:

- a. penyelenggaraan PPK yang terdiri atas:
 1. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal;
 2. PPK pada Nonformal;
 3. PPK pada Informal,
- b. pelaksana dan
- c. pendanaan.

Dijelaskan dalam pasal 6, penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan: (a). Intrakurikuler; (b). Kokurikuler; dan (c). Ekstrakurikuler. Pelaksanaannya tersebut dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lingkungan satuan pendidikan. Proses pengelolaannya menggunakan prinsip-prinsip Manajemen berbasis sekolah dibawah tanggung jawab kepala sekolah/madrasah dengan dibantu oleh para guru-guru. Tanggungjawab kepala sekolah/madrasah dan guru dilaksanakan sebagai pemenuhan beban kerja guru.

Pada pasal yang ke 7 merupakan penjabaran dan perincian dari pasal 6 tentang kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Penyelenggaraan PPK pada kegiatan intrakurikuler merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Artinya bahwa pelaksanaan PPK harus diinternalisasikan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 yang saat ini diterapkan pada jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah, terutama dalam pelaksanaan pendidikan dalam kelas. Dalam hal ini guru harus mampu menerapkan nilai-nilai karakter dalam pembelajarannya, baik dalam materi maupun dalam metode yang digunakan dalam proses pembelajaran.

Pada pasal 8 merupakan bentuk pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dengan membangun kerjasama satuan pendidikan dengan lembaga lainnya. Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler dapat dilakukan melalui kerja sama antar satuan pendidikan formal, antara satuan pendidikan formal dengan satuan pendidikan nonformal dan antara satuan pendidikan formal dengan lembaga keagamaan dan lembaga lain yang terkait.

Di pasal 9 diatur tentang hari masuk sekolah pada jalur pendidikan formal. Satuan pendidikan diberikan opsi untuk memilih

hari masuk sekolah selama lima hari atau enam hari dalam seminggu. Inilah opsi penting yang ada dalam Perpres ini dalam rangka membendung ketegangan kelompok yang pro maupun yang kontra terhadap full day school. Lebih dalam bahwa opsi seperti ini justru akan membahayakan pelaksanaan pendidikan karena akan terjadi ketidakseragaman dalam waktu belajar. Mestinya dalam point ini pemerintah harus tegas menetapkan jumlah hari masuk sekolah, karena sebelum Peraturan ini ditetapkan telah terjadi kegaduhan dalam pelaksanaan pendidikan terkait waktu masuk sekolah dalam seminggu. Pilihan opsi tersebut sepertinya bukan opsi untuk menyelesaikan kegaduhan waktu masuk sekolah, justru akan membingungkan dan memberatkan satuan pendidikan untuk mengambil Keputusan dan seakan pemerintah lepas tangan atas kegaduhan tentang waktu masuk sekolah dan menyerahkan masalah tersebut pada satuan pendidikan masing-masing.

Pada point penyelenggaraan PPK pasal 6 sampai pasal 9 mengatur tentang pelaksanaannya pada jalur pendidikan formal, sedangkan pada pasal 10 mengatur penyelenggaraan PPK pada jalur pendidikan nonformal. Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui satuan pendidikan nonformal berbasis keagamaan dan satuan pendidikan nonformal lainnya. Satuan pendidikan nonformal lain meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, sanggar budaya, perkumpulan/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasi profesi terkait. Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pasal yang ke 11 mengatur penyelenggaraan PPK pada jalur pendidikan informal. Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Informal dilakukan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Dalam Perpres tersebut satuan pendidikan formal memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter. Satuan pendidikan formal yang dimaksud adalah lembaga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terdiri dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK. Tanggungjawab besar untuk penyelenggaraan pendidikan karakter yang dapat mengantarkan peserta didik mencapai kemampuan baik dari segi

pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Penerapan pendidikan karakter dalam PPK lebih menekankan pada nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana kita ketahui dan kita ikuti bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, menjadi pandangan hidup bangsa dan menjadi sumber dari segala sumber hukum serta menjadi inspirasi kehidupan masyarakat Indonesia. Lima sila yang terdapat dalam Pancasila memiliki makna yang mendalam dan terkandung nilai-nilai untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila akan menunjukkan identitas masyarakat sebagai masyarakat, warga bangsa Indonesia. Memperkuat karakter masyarakat dengan nilai-nilai Pancasila semakin menunjukkan identitas masyarakat Indonesia. Penghayatan dan pendalaman akan nilai-nilai Pancasila akan menjadikan semangat untuk menjaga ideologi Pancasila dari godaan dan bahkan rongrongan untuk mengganti ideologi Negara

Madrasah merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam konteks ini madrasah yang dimaksud adalah satuan pendidikan umum yang berciri khas Islam dan secara kelembagaan berada di bawah naungan Kementerian Agama. Di madrasah prosentase pembelajaran keagamaannya lebih besar dari pada materi yang umum.

Dalam menyikapi Peraturan Presiden tersebut, madrasah harus mampu mempersiapkan dirinya dengan segala perubahan yang terjadi yang diakibatkan oleh kemunculan Peraturan itu. Penempatan posisi menjadi sesuatu yang penting dalam rangka menangkap moment penguatan pendidikan karakter tersebut, melakukan berbagai macam aktivitas dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat tetapi tidak menyalai atau keluar dari konteks regulasi yang ditetapkan pemerintah.

Pastinya semua lembaga pendidikan akan menangkap moment tersebut untuk membranding dan mendesain lembaganya dengan berbagai aktivitas dan kegiatan dalam rangka menarik perhatian masyarakat untuk memakai jasanya. Dengan hal tersebut persaingan antar lembaga pendidikan akan semakin ketat.

Madrasah yang memiliki ciri khas keagamaan Islam memiliki point tersendiri dalam penguatan pendidikan karakter. Sebenarnya jauh sebelum Peraturan itu muncul pembinaan dan penanaman karakter sudah diterapkan di madrasah. Dalam kondisi ini madrasah harus mampu menangkap peluang untuk membranding dirinya sebagai lembaga pendidikan yang sangat diminati dan diharapkan

mampu mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Demikian pula dengan pesantren sebagai tempat pendidikan agama memiliki basis sosial yang jelas, karena keberadaannya menyatu dengan masyarakat. Pada umumnya, pesantren hidup dari, oleh, dan untuk masyarakat. Visi ini menuntut adanya peran dan fungsi pondok pesantren yang sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, bangsa, dan negara yang terus berkembang,¹⁴ penekanannya dalam hal ini madrasah dan pesantren adalah satu visi.

Dalam rangka menyikapi hal di atas dan sebagaimana diuraikan dalam pendahuluan di atas bahwa focus kajian ini menitik beratkan pada bagaimana positioning madrasah dalam penyelenggaraan PPK yang berdasarkan pada pasal 6 dan bagaimana positioning madrasah dalam menyikapi hari masuk sekolah yang berdasarkan pada pasal 9 dari Peraturan Presiden di atas. Secara umum tujuan pembahasan permasalahan di atas adalah madrasah perlu menentukan posisinya dalam menyikapi hal ini. Dalam pandangan penulis bahwa hal ini perlu dibahas karena berkaitan dengan pemasaran dan persaingan antar lembaga pendidikan.

Dengan kondisi yang terjadi pada hari ini berkaitan dengan degradasi akhlak, krisis moral, kenakalan remaja dan penyakit-penyakit masyarakat lainnya, maka masyarakat akan menjujukan pilihan lembaga pendidikan untuk anaknya kepada lembaga pendidikan yang mampu menyediakan solusi di atas, maka penentuan posisi madrasah dalam penguatan pendidikan karakter menjadi sesuatu yang penting.

Pokok pembahasan yang pertama berkaitan dengan penyelenggaraan PPK, dalam Perpres tersebut pelaksanaan PPK diinternalisaikan dalam tiga program pembelajaran yaitu, intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dengan semangat Manajemen Berbasis Sekolah, madrasah dapat melaksanakan ketiga program tersebut secara mandiri sesuai dengan kondisi madrasah dan tuntutan masyarakat.

Artinya dengan MBS, pelaksanaan PPK diatur sepenuhnya oleh madrasah. Karena madrasah yang mengetahui secara detail Kebutuhan dan kondisi peserta didiknya, ketercukupan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta ketercukupan pendanaan dan sarana prasarana pendidikan. Dengan pengelolaan yang sedemikian ini maka PPK akan tepat sasaran dan mudah dilaksanakan.

¹⁴Afiful Ikhwan, *Development Of Quality Management Islamic Education In Islamic Boarding School (Case Study Madrasah Aliyah Ash Sholihin)*, *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, Vol. 1, No. 1, Desember 2017, 103.

MBS adalah desentralisasi level otoritas penyelenggaraan kepada level sekolah. Tanggung jawab dan pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan sekolah telah diserahkan kepada kepala sekolah, guru-guru, para orang tua siswa dan kadang-kadang peserta didik atau siswa dan anggota komunitas sekolah yang lainnya¹⁵. Ini merupakan usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sekolah/madrasah dengan memerikan kewenangan penuh untuk mengelola proses pendidikan dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian untuk mengawasi.

Dalam Program intrakurikuler, PPK diinternalisasikan dalam materi-materi pembelajaran dikelas. Penguatan karakter dilaksanakan dalam setiap proses pembelajaran dengan setiap mata pelajaran ditekankan terhadap penguatan karakter peserta didik. Guru menjadi bagian penting untuk menjalankan program ini karena guru yang setiap hari bertemu dengan peserta didik untuk membimbing dan menyampaikan materi pembelajaran. Setiap materi-materi pembelajaran harus memunculkan penanaman dan penguatan karakter bagi peserta didik. Dalam kurikulum tahun 2013, kompetensi inti (KI) 1 dan 2 harus benar-benar tercapai karena melalui hal tersebut kekuatan karakter untuk peserta didik akan muncul.

Penguatan karakter juga dapat dilakukan dengan materi-materi mata pelajaran muatan local. Pilihan mata pelajaran muatan local harus materi-materi yang dapat menguatkan karakter seperti materi keagamaan dan pembentukan mental spiritual serta materi-materi mengasah ketrampilan peserta didik.

Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Kokurikuler merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum. Dalam hal ini guru memasukkan nilai-nilai karakter dalam memberikan tugas kepada peserta didik untuk mendalami materi pembelajaran yang diajarkan. Tugas tersebut dapat berupa pekerjaan rumah yang harus dikerjakan peserta didik dirumah maupun penugasan yang langsung diselesaikan dan dibahas setelah penyampaian materi pembelajaran.

Madrasah dapat memberikan penugasan kepada peserta didik dalam menunjang program intrakurikuler dengan penugasan yang menguatkan karakter, seperti melakukan observasi atau pengamatan ke tempat atau lembaga-lembaga yang berbasis karakter, seperti pondok pesantren, majelis taklim, maupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya serta lembaga kemasyarakatan yang ada di sekitar

¹⁵Suparlan, *Manajemen Berbasis Sekolah Dari Teori Sampai Dengan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 49.

peserta didik. Dari proses pengamatan dan observasi yang dilakukan setidaknya akan memberikan gambaran kepada peserta didik tentang berbagai macam sikap penguatan karakter.

Untuk program ekstrakurikuler madrasah dapat melakukan dan menyusun program kegiatan keagamaan, kedisiplinan, dan ketrampilan. Pada prinsipnya kegiatan-kegiatan yang dapat membiasakan peserta didik untuk berbuat kebaikan senantiasa dikembangkan.

Untuk menunjukkan eksistensinya madrasah banyak melakukan *show off* atau melakukan kegiatan yang nampak kepada masyarakat baik secara wujud kegiatan maupun dampak yang terjadi dari kegiatan dan program pembelajaran tersebut. Dengan hal ini akan menjedikan perhatian dan penilaian tersendiri pada masyarakat. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait atau lembaga pendidikan berbasis karakter menjadi sesuatu yang sangat penting bagi penetapan posisi madrasah dalam menguatkan pendidikan karakter untuk peserta pendidikannya.

Lembaga pendidikan pada hakikatnya bertujuan memberi layanan. Pihak yang dilayani ingin memperoleh kepuasan dari layanan tersebut, karena mereka sudah membayar cukup mahal kepada lembaga pendidikan. Jadi marketing jasa pendidikan berarti kegiatan lembaga pendidikan memberi layanan atau menyampaikan jasa pendidikan kepada konsumen dengan cara yang memuaskan¹⁶.

Desain madrasah adalah menyikapi pasal 9 yang memberikan opsi tentang hari masuk sekolah. Madrasah mesti berani mengambil sikap dalam hal ini, karena memang akan berdampak yang signifikan terhadap tanggapan masyarakat. Madrasah harus melakukan analisa-analisa yang mendalam dan melakukan survey terhadap tanggapan tentang hari masuk sekolah, agar jangan sampai salah langkah untuk menentukan kebijakan tentang hari sekolah ini.

Dalam kaitannya ini penulis memberikan gambaran strategi dalam pemilihan hari masuk tersebut. Opsi yang pertama, hari masuk sekolah tetap enam hari artinya tidak ada perbedaan dengan yang telah terjadi sebelumnya dan mungkin ini adalah kebanyakan yang dipilih oleh banyak madrasah. Jika hal ini yang jadi pilihan janganlah kondisi dan keberadaan madrasah tetap sama saja dengan sebelum adanya Peraturan tentang PPK. Penguatan karakter dalam proram pembelajaran baik melalui program intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler mesti dikembangkan dan lebih ditonjolkan lagi pembelajarn-pembelajaran yang berbasis karakter agar masyarakat

¹⁶Buchari Alma, *Pemasaran Stratejik Jasa Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2003), 45-46.

dapat melihat adanya sebuah Peningkatan dan perubahan kearah yang lebih baik.

Kemudian jika madrasah berani dan mampu untuk memilih hari masuk sekolah menjadi lima hari, program yang dapat dijalankan adalah mengintegrasikan sistem pendidikan madrasah dengan sistem pendidikan pesantren dengan program pembelajaran yang *full day*. Program pembelajaran yang dilakukan semi pesantren artinya di pagi hari madrasah menyajikan program pembelajaran formal dan di siang harinya melaksanakan program diniyah atau materi-materi keagamaan akan tetapi peserta didik tidak bermukim seperti santri yang bermukim di pondok.

Konsep program seperti diatas sudah banyak madrasah yang menjalankan, namun hanya untuk beberapa kelas saja atau yang biasa mereka sebut dengan kelas unggulan. Kelas unggulan ini juga menjalankan kegiatan pembelajarannya dengan full day dan hari masuknya tetap 6 hari. Andaikan madrasah melaksanakan program tersebut sebagai sistem pendidikan madrasah pasti akan menghasilkan output yang berbeda dan lebih unggul. Karena dengan sistem tersebut akan membentuk kepribadian dan karakter yang utuh bagi peserta didik. Madrasah bisa menjalankan Konsep yang berbeda dengan Konsep pembelajaran pada umumnya, hanya saja keputusan untuk menjalankan hal tersebut yang belum berani diambil oleh kebanyakan pengelola madrasah.

Tidak akan muncul persoalan jika prosedur yang dijalankan telah sesuai dengan regulasi dan kebijakan pemerintah. Tanggapan masyarakat memang akan berbeda karena menjakankan Konsep program yang berbeda, tetapi lama-lama akan timbul persepsi dan tanggapan yang positif dari masyarakat akan hal tersebut jika hasilnya memang berbeda dan lebih unggul dari pada program pada umumnya.

Penempatan posisi atau positioning madrasah dalam penguatan pendidikan karakter dapat dilakukan dengan menjalankan program-program yang berbeda yang dijalankan oleh madrasah pada umumnya. Pada dasarnya positioning ini adalah untuk mengambil hati masyarakat selaku pengguna jasa pendidikan madrasah dengan menciptakan persepsi yang berbeda dari pesaing-pesaing lainnya. Dan pada akhirnya akan muncul Keputusan dari masyarakat untuk memilih madrasah tersebut.

Keberanian dan kelihaihan kepala dan pegelola madrasah sangat berpengaruh dalam positioning ini. Tanpa adanya kreatifitas dan keberanian pengambilan Keputusan dari kepala dan pengelola madrasah mustahil rasa madrasah akan cepat berkembang dan madrasah akan menjadi idola.

Dalam strategi positioning perusahaan menurut Tjiptono dalam memasarkan produknya kepada pasar sasarannya terdiri dari 7 positioning sebagai berikut: 1) Positioning berdasarkan atribut 2) Positioning berdasarkan harga dan kualitas 3) Positioning berdasarkan pengguna atau aplikasi 4) Positioning berdasarkan pemakai produk 5) Positioning berdasarkan kelas produk tertentu 6) Positioning berdasarkan pesaing 7) Positioning berdasarkan manfaat.¹⁷ Jadi apa yang dilakukan oleh madrasah sebagaimana diatas termasuk dalam strategi atribut, strategi berdasarkan kualitas, strategi berdasarkan pengguna dan strategi berdasarkan manfaat.

Kesimpulan

Penguatan pendidikan karakter merupakan salah satu solusi dalam mengatasi krisis moral dan penyimpangan yang terjadi pada masyarakat, maka dalam pelaksanaannya harus didukung oleh semua komponen baik lembaga pendidikan formal, keluarga dan masyarakat.

Dalam melaksanakan penguatan pendidikan karakter madrasah dapat melakukan banyak strategi, dan dalam kaitannya dengan pemasaran jasa pendidikan, madrasah memerlukan positioning. Positioning madrasah dalam hal ini adalah bagaimana madrasah mampu menciptakan program-program pendidikan penguatan karakter dengan sistem yang dibangun oleh madrasah secara mandiri dan wujud program-program pendidikan tersebut lebih dinampakkan agar dapat diperhatikan dan dinilai oleh masyarakat dalam rangka menciptakan kesan yang berbeda dari masyarakat dan pada akhirnya ada keputusan dari masyarakat untuk menjadikan madrasah sebagai pilihan utama sebagai tempat pendidikan anak dan generasi penerus.

Daftar Pustaka

- Alma, Buchari. *Pemasaran Stratejik Jasa Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2003.
- Djemari Mardapi. "Penilaian Pendidikan Karakter." *Bahan Tulisan Penilaian Pendidikan Karakter UNY*, 2011. http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/Penilaian_karakter.pdf.
- Ikhwan, Afiful. 2013. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI)*. Malang: Insan Cita Press Malang dan STAIM Tulungagung.

¹⁷Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 110.

- Ikhwan, Afiful. 2018. *Filsafat Pendidikan Islam: Memahami Prinsip Dasar*. Yogyakarta: CV. Diandra Kreatif.
- Ikhwan, Afiful. *Akreditasi Madrasah Aliyah (MA) Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional*, Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 2, Nomor 2, November 2014.
- Ikhwan, Afiful. *Manajemen Perencanaan Pendidikan Islam (Kajian Tematik Al-Qur'an dan Hadist)*, EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 4, Nomor 1, Juni 2016.
- Ikhwan, Afiful. *Perguruan Tinggi Islam dan Integrasi Keilmuan Islam: Sebuah Realitas Menghadapi Tantangan Masa Depan*, Jurnal Ilmu Tarbiyah "At-Tajdid", Vol.5, No.2, Juli 2016.
- Ikhwan, Afiful. *Development Of Quality Management Islamic Education In Islamic Boarding School (Case Study Madrasah Aliyah Ash Sholihin)*, Al-Hayat: Journal of Islamic Education, Vol. 1, No. 1, Desember 2017.
- Ikhwan, Afiful. *Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi*, EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 5, Nomor 1, Juni 2017.
- Ikhwan, Afiful. *AKREDITASI MADRASAH ALIYAH (MA) DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL*, Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 2, Nomor 2, November 2014.
- Kotler, Philip, and Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran Jilid I (Edisi Ke-12)*. Jakarta: PT Index, 2008.
- Maimun, Agus, and Agus Zaenul Fitri. *Madrasah Unggulan (Lembaga Pendidikan Alternatif Di Era Kompetitif)*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Mu'in, Fatchul. *Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoretik & Praktik*. Cet. 1. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Naim, Ngainum. *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan Dalam Pengembangan Ilmu Dan Pembentukan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Nata, Abuddin. *Kapita Selekta Pendidikan Islam; Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Saxena, Rajan. *Marketing Management*. 4th ed. New York: The McGraw-Hill, 2009.
- Soebahar, Abd Halim. *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru*

Sampai UU Sisdiknas. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Suparlan. *Manajemen Berbasis Sekolah Dari Teori Sampai Dengan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset, 2008.

Wijaya, David. *Pemasaran Jasa Pendidikan*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.